

# 1 Juta Demonstran Tuntut Mundur,

Ini Reaksi Pemimpin Hong Kong

Reporter: **Non Koresponden**

Editor: **Maria Rita Hasugian**

Senin, 10 Juni 2019 09:37 WIB



*Pemimpin kota Hong Kong yang ditunjuk Beijing, Cina, Carrie Lam. [Hong Kong Free Press]*

TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin kota semi-otonomi [Hong Kong](#), Carrie Lam Cheng Yuet telah dipaksa mundur oleh lebih dari 1 juta demonstran yang turun ke jalan tadi malam untuk menolak rancangan undang-undang ekstradisi yang sedang dibahas di legislatif.

Lam dianggap menjadi perpanjangan tangan Cina di Hong Kong sejak dia diberi jabatan sebagai pemimpin di kota ini tahun 2017.

Baca juga: [1 Juta Warga Hong Kong Demo Tolak RUU Ekstradisi Cina](#)

Lam yang mendapat dukungan penuh Beijing untuk menggolkan RUU Ekstradisi tidak bereaksi apapun tentang tuntutan mundur dari para demonstran.

Menurut laporan Hong Kong Free Press, Lam menghadiri 3 acara publik pada hari Minggu saat berlangsung demonstrasi, namun tidak memberikan tanggapan apapun.

Di hari yang sama, yang muncul hanya pernyataan juru bicara pemerintah Hong Kong yang dikutip sejumlah media saat awal demonstran mulai bermunculan pada hari Minggu. Pemerintah mengatakan RUU Ekstradisi yang kontroversial itu berdasarkan pada hukum.



*Ribuan pengunjung rasa melakukan aksi menuntut penghapusan usulan peraturan ekstradisi ke Cina di depan gedung parlemen Hong Kong, 9 Juni 2019. Peraturan baru ini dikhawatirkan akan mengancam kebebasan sipil dan perlindungan hukum di Hong Kong. REUTERS/Tyrone Siu*

Baca juga: [Larangan Promosikan Kemerdekaan Hong Kong dari Cina Disahkan](#)

Pemerintah Hong Kong mendesak legislatif untuk mengawasi pembahasan RUU ini di tengah aksi protes berlanjut di luar gedung parlemen.

Mengutip South China Morning Post, 21 Mei 2019, Wakil pemimpin Cina, Han Zheng, mengatakan, RUU Ekstradisi itu untuk membantu kota menunjukkan tegaknya hukum dan keadilan.

Han juga mendesak setiap warga Hong Kong untuk mendukung RUU yang membolehkan seorang tersangka di Hong Kong dipindahkan proses hukumnya di kota yang tidak punya kesepakatan ekstradisi dengan Hong Kong termasuk Cina daratan.

"Semua sektor harus bekerja keras bersama-sama untuk membantu Hong Kong membangun citra yang baik di aspek penegakan hukum di seluruh dunia," kata Han.

Lam membela para pejabat di Cina dengan mengatakan keterlibatan Beijing dalam penggodokan RUU ini adalah hal wajar setelah kekuatan asing mengubahnya menjadi masalah kedaulatan bagi Cina.

Baca juga: [Bandara Hong Kong Pasang Sensor Pengenal Wajah](#)

"Ini bukan hanya urusan internal Hong Kong. Ini sudah meningkat ke level negara, dua sisem dan konstitusionalitas dari Hukum Dasar," kata Lam merujuk pada kebijakan pemerintah Beijing untuk Hong Kong dan mini-konstitusi kota itu.

Apapun penjelasan Cina dan Lam, warga Hong Kong tetap menolak RUU Ekstradisi itu dan menuntut Lam serta semua pejabat senior mundur.

"Dia harus menarik rancangan undang-undang itu dan mundur," kata James To, mantan anggota legislatif partai Demokrat saat berdemo di pada Minggu malam, 9 Juni 2019 seperti dikutip dari Reuters.

"Seluruh warga Hong Kong menolaknya," tegas To lagi.

Demonstrasi hingga memasuki hari Senin, 10 Juni masih berlangsung. Para demonstran memenuhi taman Victoria yang menjadi simbol perjuangan warga [Hong Kong](#) terhadap Cina.

## 1 Juta Warga Hong Kong Demo Tolak RUU Ekstradisi Cina

Reporter: **Non Koresponden**

Editor: **Maria Rita Hasugian**

Senin, 10 Juni 2019 08:45 WIB



*Ribuan pengunjung rasa melakukan aksi menuntut penghapusan usulan peraturan ekstradisi ke Cina di depan gedung parlemen Hong Kong, 9 Juni 2019. Peraturan baru ini dikhawatirkan akan mengancam kebebasan sipil dan perlindungan hukum di Hong Kong. REUTERS/Tyrone Siu*

TEMPO.CO, Jakarta - Lebih dari 1 juta orang melakukan demonstrasi di [Hong Kong](#) pada Minggu malam, 9 Juni 2019 untuk menolak rancangan undang-undang ekstradisi yang memberi izin aparat penegak hukum membawa tersangka diadili di pengadilan di Cina daratan.

Para demonstran menduga RUU Ekstradisi menysar warga Hong Kong dengan alasan politik, pelanggaran bisnis yang tidak disengaja, dan merusak sisem hukum semi-otonomi.

Baca juga: [Cina Perlahan Mulai Terapkan Larangan Berekspresi di Hong Kong](#)

Mengutip laporan CNN, Minggu, 9 Juni 2019, protes atas rancangan undang-undang Ekstradisi ini juga disuarakan kalangan komunitas bisnis yang selama ini dianggap pro-konservatif dan adu pukul di badan legislatif Hong Kong.

Sejumlah negara termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa mengkritik Cina dengan mengeluarkan rancangan undang-undang ekstradisi ini.

Demonstrasi terbesar sejak Hong Kong diserahkan Inggris ke Cina tahun 1997 membuat aparat kepolisian bekerja keras mencegah upaya demonstran memaksa masuk ke gedung Dewan Legislatif di distrik bisnis Admiralty.



*Ribuan pengunjung rasa melakukan aksi menuntut penghapusan usulan peraturan ekstradisi ke Cina di depan gedung parlemen Hong Kong, 9 Juni 2019. REUTERS/Tyrone Siu*

Baca juga: [Anggota Parlemen Hong Kong Berkelahi saat Rapat RUU](#)

Polisi menyemprotkan air lada ke arah pendemo. Hingga Senin pagi ini para demonstran bertahan di sekitar gedung.

Mengutip laporan Reuters, veteran anggota parlemen dari partai Demokrat Hong Kong James To menuntut Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam yang selama ini diketahui pendukung Beijing untuk mundur dari jabatannya.

"Dia harus menarik rancangan undang-undang itu dan mundur," kata To.

Baca juga: [Rasisme Semakin Meluas, LSM di Hong Kong Lakukan Ini](#)

Lam belum memberikan tanggapannya atas tuntutan demonstran yang menolak pemberlakuan rancangan undang-undang ekstradisi dan menuntutnya mundur dari jabatannya.

Para demonstran yang memenuhi jalan-jalan di Hong Kong tampak membawa payung kuning yang menjadi simbol perlawanan kelompok pro-demokrasi dalam aksi protes selama 79 hari pada tahun 2014.

Mereka meneriakkan "Tidak ada ekstradisi Cina, tidak ada hukum iblis, sambil berjalan mengitari jalan-jalan kota, dan yang lainnya meneriakkan agar Lam dan pejabat senior [Hong Kong](#) lainnya mundur.